

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Nusa Tenggara Barat guna mengatasi konflik sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sangat diperlukan guna meredam konflik yang terjadi, hal ini disebabkan karena merupakan bagian dari struktural organisasi di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat.
2. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat Direktorat Intelkam Polda Nusa Tenggara Barat guna mengatasi konflik sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu faktor pendukung terdiri dari adanya tim yang solid, adanya dukungan dari Masyarakat, adanya peningkatan dan penguatan kerjasama antara Intansi, sedangkan faktor penghambat yaitu faktor terbatasnya jumlah personil, terbatasnya Pendidikan anggota intelkam dan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan monitoring.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Biro Perencanaan untuk mengusulkan anggaran Dit Intelkam sesuai kegiatan pelaksanaan tugas.
2. Diharapkan kepada Biro Sumber Daya Manusia untuk menambah jumlah personil serta mengajukan kepada Mabes Polri untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Dit Intelkam Polda Nusa Tenggara Barat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Liteatur

- Agusman M. Ali, 2014. *Pengantar Konflik Sosial*, Jakarta: Pustaka Iltizam.
- Amiruddin dan zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet; 6 Raja Grafindo, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir Manan. 2000. "Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah." Makaiah pada Seminar Nasional Pengembangan Wllayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Pesisir. Bandung.
- Damsar, 2010. *Pengantar Sosiologi Konplik*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, 2002. *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta.
- Indroharto, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J.G. Brouwer dan Schilder, 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibr.
- Philipus M. Hadjon, 2011, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- 1998. *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya,
- Poerwodarminto, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Stout HD, 2004. *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.

Soejono soekanto, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004. "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Sarlito W. Sarwono dkk, 2009. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002. *Paradoks Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*.

Wahi Din, 2005. *Penyebab konflik*, RajaGrafindo, Jakarta.

B. Jurnal

Ateng Syafrudin, 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Internet

<https://www.bola.com/ragam/read/5190883/contoh-contoh-konflik-sosial-di-indonesia>, diakses tanggal 20 November 2023 pukul 20.00

<https://nasional.tempo.co/read/457121/kontras-konflik-sumbawa-liberalisasi-kerusuhan>

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Wawancara dengan Direktur Intelkam Polda NTB an. Kombespol Hendro Kusmayadi, S.I.K., M.H.



Wawancara dengan Kasubdit IV Dit Intelkam Polda NTB an. Akbp Moh. Yunus Junaidi, SH., MH.



Wawancara dengan Kepala Kesbangpoldagri Prov. NTB an. H. Ruslan Abdul Gani, SH., MH.



Wawancara dengan Ketua Asosiasi Kepala Desa Lombok Barat an. SAHRUL, SH.

